

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN *WISHTLEBLOWING*
SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD***
**(STUDI KASUS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT
BANDUNG)**

Rina Nurhasanah¹; R. Wedi Rusmawan Kusumah²

Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Widyatama, Kota Bandung^{1,2}

Email : rina.nurhasanah@widyatama.ac.id¹; wedi.rusmawan@widyatama.ac.id²

ABSTRAK

Tingginya kasus kecurangan di PT Pos Indonesia (Persero) yang telah mengakibatkan kerugian negara yang besar menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Contoh kecurangan jenis ini antara lain penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak audit internal dan mekanisme *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Bandung. Populasi penelitian ini adalah 18 auditor internal, 13 pegawai Subdirektorat Manajemen Risiko, dan 11 pegawai Divisi Akuntansi. Total responden penelitian ini adalah 42 orang. Pendekatan sampling jenuh (*sensus*) yang digunakan dalam penelitian ini berarti jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Staf internal diberikan kuesioner untuk diisi, yang merupakan data awal penelitian. Pendekatan analisis regresi linier berganda digunakan dalam analisis multivariat penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung untuk mencegah kecurangan dipengaruhi oleh audit internal dan sistem *whistleblowing*.

Kata Kunci : Audit Internal; *Whistleblowing System*; Pencegahan *Fraud*

ABSTRACT

The high number of fraud cases at PT Pos Indonesia (Persero), which have caused the state to suffer large financial losses, is the driving force for this study. Examples of this type of fraud include asset misappropriation, corruption, and financial report manipulation. This study aims to assess the impact of internal audit and the whistleblowing mechanism on fraud prevention at the Bandung headquarters of PT Pos Indonesia (Persero). 18 internal auditors, 13 employees of the Risk Management Sub-Directorate, and 11 employees of the Accounting Division made up the study's population. There were 42 responders in all. The saturated sampling approach (census) utilized in this study means that the number of samples is equal to the population. Internal staff were given questionnaires to complete, which provided the study's initial data. Multiple linear regression analysis approaches were used in this study's multivariate analysis. The study's findings show that PT Pos Indonesia (Persero) Head Office in Bandung's attempts to prevent fraud are influenced by internal audit and the whistleblowing system.

Keywords : Internal Audit; Whistleblowing System; Fraud Prevention

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, *fraud* merupakan perhatian utama bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Keruntuhan akibat tidak adanya mekanisme pencegahan dan pendeteksian *fraud* yang efektif dialami berbagai perusahaan. Maulana dkk. (2025) menyatakan bahwa *fraud* adalah salah satu jenis kecurangan yang sangat merugikan pada dunia bisnis, merusak nama perusahaan, merugikan para investor, dan membawa dampak sosial yang signifikan seperti yang terlihat pada kasus besar seperti Enron di Amerika dan *eFishery* di

Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Deloitte (Bucheru et al., 2025), yang melaporkan bahwa lebih dari 50% kasus *fraud* terjadi akibat lemahnya pengendalian internal atau karena adanya penyimpangan terhadap pengendalian yang sudah ada. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak menerapkan strategi pencegahan *fraud* secara memadai memiliki resiko kerugian keuangan yang jauh lebih tinggi. Karenanya, penguatan fungsi audit internal menjadi hal yang penting untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan operasi perusahaan.

Menurut Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang diselenggarakan oleh ACFE pada tahun 2019, dengan dasar dari *Report to The Nation* (RTTN), jenis tindak pidana penipuan yang sangat sering terjadi dan menimbulkan kerugian paling besar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi, dan lembaga yang paling dirugikan akibat tindak pidana penipuan adalah pemerintah pada urutan pertama dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada urutan kedua. (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2019).

Berdasarkan pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mencapai tahap penyidikan ada sebanyak 119 kasus, melibatkan 340 tersangka, dalam periode 2016 hingga 2021. Kerugian negara dari seluruh kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 47,92 triliun. Rinciannya, terdapat 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada tahun 2017, 21 kasus pada tahun 2018, 20 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada tahun 2021 yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. (Aditya & Nurbaiti, 2020).

PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa kurir dan logistik. Layanan utama yang diberikan PosIND yaitu *Courier Express Parcel* (CEP), Jasa Keuangan, Ritel dan Properti. Sebagai BUMN PT Pos Indonesia (Persero) tidak luput dari *fraud*, beberapa kasus diantaranya yaitu kasus korupsi penggelapan dana nasabah e-Batara Pos sebesar 3,7 miliar milik 104 nasabah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pos Cabang (KCP) Air Sugihan Palembang yang terjadi pada tahun 2022 (Tanjung, 2024).

Kemudian penggelapan dana operasional sebesar rp 398.467.680 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Werinama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam kurun waktu Juli sd Agustus 2023. Motif dalam kasus ini adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatannya oleh tersangka yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, dan menyebabkan kerugian untuk keuangan negara. Penyidik menggunakan bukti dalam kasus ini, termasuk perintah pengosongan uang tunai, laporan pemeriksaan uang tunai, transaksi bank Pospay dan BRI milik tersangka, dan dokumen N2. (Patty, 2024); (Purbayati et al., 2022). Selanjutnya berdasarkan laporan dengan Nomor LP/B/1177/V/2022/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung tanggal 31 Mei 2022. Peristiwa hilangnya materai senilai 1.5 Miliar

atau sebanyak 150.000 lembar kopure 10.000 yang terjadi di Kantor Pos Bandar Lampung (Riduan, 2022).

Berdasarkan Laporan Manajemen, jumlah temuan hasil pemeriksaan Audit Internal PT Pos Indonesia (Persero) meningkat sebesar 14%, dari 1.124 temuan pada tahun 2023 menjadi 1.278 temuan pada tahun 2024 dengan kenaikan nilai kerugian sebesar 66,87%. (Nawawi & Salin, 2018), tingginya angka kecurangan dalam suatu organisasi dapat dijadikan sebagai indikator lemahnya fungsi audit internal dalam menjalankan peran pengawasan dan pencegahan.

Pencegahan *fraud* atau kecurangan ini mengupayakan hal yang dilakukan oleh organisasi untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan di dalam lingkungan organisasi. Menurut Singleton & Singleton, (2010:132) kunci untuk mencegah *fraud* terletak pada memahami budaya organisasi dan jika diperlukan harus melakukan perubahan. Ketakutan akan penjara, rasa malu, atau kehilangan hubungan keluarga dapat menjadi penghalang yang cukup kuat bagi banyak calon pelaku penipuan, membuat mereka berpikir ulang dan memutuskan bahwa risiko tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Kecurangan dapat berupa tindakan yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau perilaku tidak etis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan organisasi. Pencegahan *fraud* adalah tanggung jawab bersama organisasi dan memerlukan komitmen dari semua tingkat manajemen serta partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Pencegahan *fraud* melibatkan kerja sama antara berbagai tingkatan di dalam organisasi.

Menurut Sawyer & Sawyer (2019), audit internal berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi dan mencegah *fraud* sebelum berkembang menjadi masalah besar. Singleton & Singleton (2010) juga menyatakan bahwa fungsi audit internal yang efektif merupakan bentuk pencegah *fraud* yang kuat. Hal ini diperkuat oleh Standar Profesional Audit Internal dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA), khususnya dalam standar 2120.A2, yang menyatakan bahwa aktivitas audit internal wajib mengevaluasi potensi terjadinya *fraud* dan bagaimana organisasi mengelola risiko tersebut. Melalui pendekatan audit berbasis risiko, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, serta peningkatan budaya etika dalam organisasi, audit internal mampu menutup celah yang dapat dimanfaatkan pelaku *fraud*. Oleh karena itu, semakin efektif pelaksanaan fungsi audit internal, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi.

Fungsi audit internal memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan kinerja perusahaan, baik di sektor swasta maupun publik. Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam *International Professional Practices Framework (IPPF)*, keberadaan audit internal harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi, seperti ukuran, kompleksitas, serta

keragaman aktivitas perusahaan, agar dapat memberikan pengawasan yang efektif dan efisien. Perihal ini sebagaimana dengan pandangan Gramling et al., (2023) yang mengatakan bahwa kebutuhan akan fungsi audit internal sangat bergantung pada skala perusahaan dan pertimbangan cost-benefit, yaitu keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal. Selain itu, Arens et al., (2019) menegaskan bahwa audit internal berperan penting dalam mendeteksi risiko, penyimpangan, dan mencegah terjadinya fraud sebelum menimbulkan dampak kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Dengan demikian, fungsi audit internal yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga meminimalisasi risiko kecurangan dan penyimpangan dalam aktivitas perusahaan.

Berdasarkan Survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019, sistem *whistleblowing* (WBS) dianggap sebagai metode pencegahan penipuan yang paling efektif sebagai pengendalian anti-fraud, dengan persentase efektivitas sebesar 22,6%. (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2019).

Salah satu keuntungan dari *sistem whistleblowing*, menurut Tuanakotta (2019), adalah adanya mekanisme untuk mendeteksi masalah pelanggaran secara dini. Miceli et al. (2008) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pemberitahuan atau penyampaian informasi dari anggota organisasi, perusahaan, atau pihak lain dari organisasi. Perilaku menyimpang atau di luar aturan yang berlaku oleh seseorang yang melakukannya di dalam perusahaan dianggap sebagai *whistleblowing*. *Whistleblower* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menyampaikan ini.

Menurut ACFE (2024), hal paling populer untuk menemukan penipuan/fraud adalah melalui metode pelaporan atau pengungkapan pelanggaran, dengan kontribusi sebesar 42% terhadap pengungkapan kasus *fraud*. Miceli et al., (2008) juga menegaskan bahwa sistem *whistleblowing* yang efektif mampu mencegah *fraud* dengan meningkatkan persepsi bahwa pelanggaran akan terungkap. Lebih lanjut, OECD (2023) menyatakan bahwa sistem pelaporan dan perlindungan pelapor adalah alat penting dalam pemberantasan *fraud* dan korupsi. Dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman, anonim, dan terpercaya, organisasi dapat mendorong pelaporan dini terhadap perilaku menyimpang, sehingga memperkecil peluang dan rasionalisasi terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, keberadaan dan efektivitas *whistleblowing system* sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang transparan dan berintegritas, serta dalam menekan tingkat terjadinya *fraud*.

Studi Astuti (2019) dan Nurjanah & Setiawan, 2021 menemukan bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan penipuan (fraud). Studi Sutadisastra (2021) dan Syafitri & Syafidinal, 2023 menemukan bahwa audit internal dan

whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Studi Faris (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal dan audit internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung).”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam Arens et al., (2019:338) pada buku *Auditing & Jasa Assurance*, *fraud* merupakan sebuah konsep hukum yang luas, kecurangan menjelaskan setiap langkah penipuan (*fraud*) yang disengaja atau dilakukan secara sadar, bertujuan untuk mendapatkan aset atau hak milik orang lain. Dalam konteks audit laporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai penyajian laporan keuangan yang tidak benar, yang dilakukan secara sengaja. *Fraud* merupakan istilah yang umum dipahami dan tidak terbatas pada berbagai cara yang dapat diterapkan dengan kemampuan tertentu yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat dari orang lain melalui pernyataan yang salah. (Albrecht et al., 2019).

Sebagaimana diuraikan dalam SAS 99 (AU316), yang dikutip oleh Karyono (2013:8), ada tiga faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi. Tiga komponen ini disebut “segitiga sama sisi” dan digambarkan dalam segitiga bersudut sama karena bobot atau derajat ketiga kondisi yang sama.

Pencegahan *fraud* atau kecurangan ini mengupayakan hal yang dilakukan oleh organisasi untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko terjadinya kecurangan di dalam lingkungan organisasi. Menurut Singleton & Singleton, (2010:132) kunci untuk mencegah *fraud* terletak pada memahami budaya organisasi dan jika diperlukan harus melakukan perubahan. Ketakutan akan penjara, rasa malu, atau kehilangan hubungan keluarga dapat menjadi penghalang yang cukup kuat bagi banyak calon pelaku penipuan, membuat mereka berpikir ulang dan memutuskan bahwa risiko tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Kecurangan dapat berupa tindakan yang melibatkan manipulasi, penipuan, atau perilaku tidak etis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan organisasi. Pencegahan *fraud* adalah tanggung jawab bersama organisasi dan memerlukan komitmen dari semua tingkat manajemen serta partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Pencegahan *fraud* melibatkan kerja sama antara berbagai tingkatan di dalam organisasi.

Audit Internal

Arens et al., (2019:28), menyatakan bahwa auditing adalah sebuah proses pengumpulan dan penilaian bukti yang berkaitan dengan hal penting untuk menilai dan menyampaikan sejauh

mana kenyataan dan informasi yang telah didapatkan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Proses auditing perlu dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi, sifat independen, dan integritas yang tinggi.

Dari pemaparan di atas, sebuah kesimpulan yang dapat diambil adalah audit merupakan sebuah proses pemeriksaan yang terstruktur dalam laporan keuangan, dengan mengumpulkan dan menilai bukti secara objektif untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Proses ini dijalankan oleh pihak yang memiliki keahlian dan bersifat independen.

Penelitian ini lebih menekankan pada audit internal. Aktivitas audit internal terus berkembang seiring dengan semakin pentingnya peran ini dalam membantu manajemen meningkatkan nilai perusahaan. Audit internal juga memberikan saran konsultasi terkait kegiatan perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Audit internal modern lebih meluas ke audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit sosial, dan lainnya, dan tidak lagi terbatas pada pemeriksaan keuangan. Selain itu, konsultasi saat ini termasuk dalam audit internal yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan operasional dan meningkatkan nilai organisasi. Audit internal, juga dikenal sebagai pemeriksaan internal, adalah suatu proses penilaian yang dilakukan secara mandiri di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mendengarkan dan menilai operasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. (Tugiman, 2019:99).

Audit internal (pemeriksaan intern) dilakukan oleh bagian audit internal perusahaan, yang memeriksa laporan keuangan, catatan akuntansi yang ada, serta memverifikasi kepatuhan terhadap ketetapan yang telah diambil oleh manajemen puncak, dan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dan ketentuan profesional yang relevan (Agoes, 2022:218).

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil yakni audit internal adalah kegiatan yang bersifat mandiri dan objektif, yang menawarkan jaminan serta saran untuk meningkatkan nilai dan kinerja suatu organisasi. Kegiatan tersebut mendukung pihak manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya melalui penyediaan analisis, evaluasi, rekomendasi, dan masukan mengenai aktivitas yang sedang diaudit.

Whistleblowing System

Whistleblowing system berfungsi sebagai mekanisme untuk melaporkan kecurangan yang berpotensi merugikan perusahaan atau pihak yang berkepentingan baik yang dilakukan oleh individu di dalam maupun dari pihak eksternal. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh karyawan maupun pimpinan terhadap atasan perusahaan lain atau lembaga yang memiliki otoritas.

Diterapkannya sistem *whistleblowing* adalah suatu yang wajib dilakukan untuk menilai keefektifannya. Hal ini bertujuan memastikan bahwa sistem tersebut mencapai sasaran yang

telah ditetapkan saat program diluncurkan dan memenuhi tuntutan bisnis perusahaan. Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit atau Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab dalam memantau penerapan sistem tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, organisasi dapat mengevaluasi kinerja dan efektivitas *whistleblowing system* yang diterapkan serta menemukan area yang mungkin memerlukan perbaikan atau peningkatan. Evaluasi berkala dan perbaikan yang berkelanjutan adalah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berfungsi dengan baik dalam mendukung integritas dan kinerja organisasi.

Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Standar Profesional Audit Internal (SPAI), yang dirilis oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal pada tahun 2024, audit internal adalah proses yang tidak memihak dan independen yang berfungsi sebagai alat konsultasi dan jaminan untuk kinerja auditor internal yang berkualitas tinggi dan efisiensi pelaksanaan audit. Standar ini menetapkan standar audit yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan audit internal untuk menjaga kualitas kinerja auditor internal dan efektivitas pelaksanaan audit. Dengan mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan prosedur tata kelola, audit internal membantu bisnis dalam mencapai tujuan mereka.

Standar profesional audit internal menurut Tugiman (2019:16), menekankan pentingnya beberapa indikator seperti independensi, keahlian profesional, jangkauan tugas audit internal, pelaksanaan prosedur pemeriksaan, dan pengelolaan divisi audit internal. Agar audit dapat dilakukan secara objektif, independensi auditor internal sangat diperlukan, sedangkan kemampuan profesional mengatur bagaimana auditor harus bersikap saat menjalankan tugasnya. Kompetensi auditor terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan baik.

Auditor internal sangat membantu manajemen dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki potensi kondisi dalam perusahaan. Menurut Standar Profesional Audit Internal (SPAI) 120.2 tahun 2004 mengenai pemahaman atas kondisi, auditor internal diharuskan memiliki pengetahuan yang mampu untuk mengidentifikasi, menelusuri, dan menguji indikasi kondisi. Selain itu, Pernyataan Standar Audit Internal (SIAS) No. 3 tentang Pencegahan, Deteksi, Investigasi, dan Pelaporan Kecurangan (1985) mengatur auditor internal dalam menjalankan fungsi pencegahan, pendeteksian, dan pemeriksaan lokasi. SIAS No. 3 juga menyatakan bahwa auditor internal bertanggung jawab untuk membuat laporan audit yang berkaitan dengan *fraud*. (Effendi, 2010).

Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa audit internal dapat membantu perusahaan untuk pencegahan *fraud*. Hal ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Utami (2018), Astuti (2019), Sutadisastra (2021), Adliana et al., (2021), Roemkenya Madolidi Handoyo & Indah Bayunitri (2021), Christine & Apriwandi (2022), yang menunjukkan bahwa audit internal mempengaruhi kecurangan, yang mana keberadaan auditor internal dalam perusahaan akan dapat mengurangi tindakan kecurangan.

H₁ : Audit Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*

Whistleblowing system adalah suatu metode yang memungkinkan individu baik dari bagian/pihak internal maupun eksternal untuk menyampaikan laporan terkait tindakan *fraud* yang melanggar kebijakan perusahaan secara rahasia atau tanpa identitas. Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) menyatakan bahwa salah satu manfaat dari penerapan *whistleblowing system* yang berjalan efektif adalah timbulnya rasa takut atau enggan bagi individu untuk melakukan pelanggaran dan adanya deteksi awal untuk kemungkinan terjadinya kecurangan. *Whistleblowing system* yang baik memiliki indikator yang mencakup aspek struktural, operasional dan perawatan yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja sistem tersebut.

Sistem *whistleblowing* menjadi bagian integral dari mekanisme pengendalian internal yang dapat mencegah terjadinya kondisi di lembaga pemerintah, menurut Semendawai (2011). Dengan adanya sistem ini, karyawan atau individu yang mungkin berniat melakukan kecurangan akan merasa enggan karena keberadaan sistem pelaporan yang efektif dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan. *Whistleblowing system* memungkinkan individu untuk melaporkan kecurangan dengan identitas yang dirahasiakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu upaya untuk mencegah tindakan kecurangan adalah dengan menerapkan *whistleblowing system*. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018), Anandya & Werastuti (2020), Yulian Maulida & Indah Bayunitri, (2021), Faris (2022), Syafitri & Syafdinal (2023), Rahmawati et al., (2023), menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang efektif mampu mencegah terjadinya kecurangan, karena dengan adanya sistem ini memberikan manfaat bagi organisasi sebagai media pengawasan eksternal dan menjaga transparansi.

H₂ : *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

Sementara itu, kerangka pemikiran teoritis dapat dibuat untuk mendukung teaah teoritis, seperti yang ada pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Pengaruh audit internal dan sistem *whistleblowing* terhadap upaya pencegahan penipuan pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung yang terletak di Jl. Cilaki No. 53, Bandung 40004. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif kausal dengan pendekatan survei. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kuantitatif kausal merupakan pendekatan dalam penelitian yang mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Data utama penelitian berasal dari pandangan responden yang diperoleh melalui distribusi kuesioner. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Memberikan pilihan jawaban, karena peneliti telah memberikan alternatif jawaban dengan skala *likert* (interval 1-5) untuk menilai sikap responden, yaitu 1=Sangat Tidak Setuju, 2=Tidak Setuju, 3=Netral, 4=Setuju, 5=Sangat Setuju).

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:126) Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan wilayah atau kelompok yang terdiri dari objek atau subjek dengan ciri dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Populasi adalah sekumpulan objek yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Objek tersebut dapat mencakup individu, dokumen, atau catatan yang relevan dan dianggap sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini merujuk pada objek yang terkait dengan pencegahan *fraud* pada PT Pos Indonesia (Persero). Dimana, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 18 orang auditor internal, 13 pegawai Sub Direktorat Risk Management dan 11 pegawai Divisi Akuntansi pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

Jenis sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh (*sensus*). Menurut Sugiyono (2019:111), teknik sampling jenuh merupakan metode penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi, dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu, 42 orang yang terdiri dari auditor internal, Sub Direktorat Risk Management dan Divisi Akuntansi yang bekerja di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel merujuk pada hal yang bisa memiliki nilai yang berbeda atau bervariasi (Sekaran & Bougie, 2019:72). Variabel-variabel penelitian harus didefinisikan, agar tidak ada

perbedaan pemahaman. Menurut Sugiyono (2019:68), variabel penelitian didefinisikan sebagai karakteristik atau nilai dari individu, objek, atau aktivitas yang menunjukkan variasi tertentu. Karakteristik ini kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Variabel-variabel yang tercantum dalam penelitian ini adalah :

Secara umum, variabel independen adalah faktor yang memengaruhi variabel terikat, dengan dampak yang bisa bersifat positif atau negatif. Dengan kata lain, variasi dari variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran & Bougie, 2019:74). Menurut Sugiyono (2019:69), variabel independen adalah jenis variabel yang berpengaruh atau yang menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen (terikat) Sugiyono (2019:69). Pada penelitian ini, penulis menyertakan dua variabel independen, yaitu: Audit Internal (X_1) dan *Whistleblowing System* (X_2).

Variabel dependen adalah jenis variabel yang sangat penting bagi peneliti. Ini adalah variabel utama yang bisa diteliti sebagai faktor yang relevan (Sekaran & Bougie, 2019:73). Menurut Sugiyono (2019:69), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari variabel independen. Melalui analisis variabel dependen, kita dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud*.

Operasionalisasi variabel adalah proses mendefinisikan metode dan cara pengukuran suatu konsep. Metode ini menunjukkan bahwa beberapa variabel dapat memicu masalah lain, di mana hal tersebut tergantung pada kondisi dan situasi variabel yang berbeda. Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang sudah disiapkan yang menggunakan skala ordinal sebagai skala pengukuran. Tabel 1 memberikan penjelasan mengenai cara setiap variabel dalam penelitian ini diterapkan atau diukur secara operasional.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji dampak Audit Internal (X_1) dan Sistem Pengungkapan Pelanggaran (X_2) terhadap Pencegahan Kecurangan (Y), yang merupakan hipotesis uji dalam penelitian ini. Rumus yang mewakili regresi linier berganda ditampilkan di bawah ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Pencegahan *Fraud* (nilai yang diprediksikan)
- X_1 : Audit Internal
- X_2 : *Whistleblowing System*
- A : Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots X_n = 0$)
- β_1 dan β_2 : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- e : Standar error (tingkat kesalahan)

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Jawaban Responden

Responden penelitian ini secara langsung terlibat dalam audit internal dan sistem whistleblowing di Bandung, tepatnya Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero). 48 pernyataan termasuk dalam instrumen kuesioner, yang terdiri dari 18 pertanyaan untuk variabel pencegahan penipuan, 20 pertanyaan untuk variabel audit internal, dan 10 pertanyaan untuk variabel sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam upaya memastikan pernyataan dalam kuesioner benar-benar dapat mengukur variabel yang ada maka dilakukan uji validitas. Uji validitas ini dilakukan dengan melihat bagaimana skor respons responden untuk setiap perjanjian saling melengkapi. Setelah membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} , data dianggap valid jika r_{hitung} lebih tinggi daripada r_{tabel} . Variabel sistem pencegahan *fraud*, audit internal, dan *whistleblowing system* memenuhi standar validitas, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Tabel 2, di mana nilai r_{hitung} lebih tinggi daripada nilai r_{tabel} , yaitu sebesar diatas 0,312.

Sementara uji reliabilitas untuk mengukur kestabilan dan konsistensi tanggapan responden terhadap pernyataan yang merupakan suatu variabel dan disusun dalam satu bentuk kuesioner (Maulana et al., 2024). Meskipun menghasilkan lebih dari satu variabel, uji reliabilitas dapat dilakukan pada semua item pernyataan sekaligus. Berdasarkan hasil tabel 3, variabel pencegahan *fraud*, audit internal, dan *whistleblowing sistem* memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60, yang menghasilkan tingkat konsistensi tinggi. Hasilnya, semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Pada gambar 2 Kurva Normal Probability Plot (P-Plot), digunakan untuk menguji normalitas. Hal ini dilakukan dengan plot probabilitas data terdistribusi di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Maka dari itu, kesimpulan yang didapat yakni bahwa model regresi memenuhi persyaratan kenormalan.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan varians antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Juniwati & Rivanda, 2023). Untuk memastikan apakah residual bervariasi antar observasi, uji heteroskedastisitas dilakukan. Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan model regresi yang mengakibatkan varians residual yang tidak proporsional pada hasil berbagai observasi. Metode uji *scatterplot* digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Temuan yang ditampilkan pada Gambar 3 mengilustrasikan tidak adanya tren yang terdefinisi dengan baik, dengan titik-titik data tersebar sembarangan, diposisikan di

wilayah positif dan negatif relatif terhadap pusat sumbu Y. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model regresi.

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Toleransi pada model regresi diukur untuk menguji multikolinearitas dalam penelitian ini. Nilai VIF untuk variabel independen yaitu 1,448, yang masih jauh di bawah batas 10, dan nilai toleransi adalah 0,691, yang lebih tinggi dari 0,10. Maka dari itu, dihasilkan kesimpulan yang mana model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas diantara variabel independen.

Analisis Deskripsi

Tabel 5 menunjukkan skor actual totalnya untuk variabel pencegahan penipuan sebesar 2.967, dengan skor ideal sebesar 3.600, dan persentase total yang dihasilkan sebesar 82,42%. Nilai rata-ratanya adalah 4,13, yang menunjukkan bahwa variabel Pencegahan *Fraud*/kecurangan pada PT Pos Indonesia (Persero) berada dalam kategori “baik”. Hal ini membuktikan jika variabel Pencegahan *Fraud*/kecurangan pada PT Pos Indonesia (Persero) berada dalam kategori “baik”.

Indikator yang mempunyai mean/rata-rata skor terendah yaitu indikator arogansi. Indikator arogansi ini merupakan penilaian atas pimpinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam indikator arogansi belum secara konsisten dilakukan oleh setiap pimpinan sehingga harus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan.

Tabel 6 menunjukkan skor aktual total dari semua pernyataan variabel audit internal yang sudah terbentuk sebesar 3.520 dan skor ideal sebesar 4.000; nilai total persentase yang dihasilkan sebesar 88,1% dan skor rata-rata sebesar 4,40 menunjukkan bahwa audit internal PT Pos Indonesia (Persero) sangat baik Indikator yang mempunyai nilai mean skor paling rendah yaitu indikator lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan ini merupakan pedoman teknis pelaksanaan audit dan mekanisme pengendalian internal yang komprehensif untuk menekan peluang terjadinya *fraud*. Dimensi yang membentuk indikator lingkup pekerjaan harus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan (Rivanda & Dwiastuti, 2024).

Pada Tabel 7 menunjukkan jika skor aktual yang dihasilkan dari semua item pernyataan pada variabel *whistleblowing system* totalnya adalah 1.532, dengan skor ideal sebesar 2.000. Persentase total yang dicapai sebesar 76,6%, dan rata-rata skor sebesar 3,83, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berada dalam kategori “baik”. Maka dari itu, *whistleblowing system* pada PT Pos Indonesia (Persero) dapat dikategorikan sebagai “baik”.

Indikator yang mempunyai nilai mean skor paling rendah yaitu indikator aspek perawatan. Aspek perawatan membuktikan hasil dari sistem pelaporan *Whistleblowing System* berjalan efektif, aman dan dapat dipercaya. Dimensi yang membentuk aspek perawatan harus dilakukan perbaikan dan peningkatan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian seperti pada tabel 8, adalah :

$$Y = 24,525 + 0,224X_1 + 0,782X_2$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 24,525 membuktikan bahwa variabel dependen Pencegahan Fraud bernilai 24,525 apabila kedua variabel independen—sistem *Whistleblowing* dan Audit Internal—berada dalam kondisi konstan atau bernilai 0.
2. Dengan koefisien regresi 0,224 untuk variabel Audit Internal, peningkatan satuan pada variabel Audit Internal akan membuat nilai Pencegahan Fraud meningkat sebesar 0,224 jika Sistem *Whistleblowing* tetap tidak berubah.
3. Nilai Pencegahan Fraud akan memiliki peningkatan sebesar 0,782 apabila variabel *Whistleblowing System* ditingkatkan satu satuan, dengan kondisi Audit Internal konstan. Hal ini dibuktikan oleh koefisien regresi sebesar 0,782 untuk variabel ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai $\text{sig } t < \text{tingkat signifikan } (0,05)$, maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai $\text{sig } t > \text{tingkat signifikan } (0,05)$, maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 10 model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel Audit Internal sebesar $0,016 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,533, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,021. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $2,533 > 2,021$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima artinya secara parsial variabel Audit Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 10 model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel *Whistleblowing System* sebesar kurang dari $0,001 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,753, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,021. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $5,753 > 2,021$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima artinya secara parsial variabel *Whistleblowing System* berpengaruh secara signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 11, di dapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar $< 0,001$, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%),

yaitu $<0,001$ lebih kecil dari 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 40,351 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,87 dari hasil tersebut terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Analisis Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dimanfaatkan untuk menilai seberapa baik model memperhitungkan perubahan dalam variabel hasil, dengan mempertimbangkan variabel inputnya. Dalam model regresi, nilai koefisien determinasi, atau R^2 , menunjukkan seberapa besar perubahan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Angka R^2 , yaitu sebesar 0,686 menurut hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 9. Dihasilkan bahwa variabel independen, audit internal, menyumbang 68,6% variasi variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan/*fraud* dan sistem pelaporan pelanggaran. Sebesar 31,4% berasal dari elemen lain yang tidak dicakup dalam metodologi penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dari temuan penelitian ini ditemukan jika audit internal berpengaruh untuk mencegah perilaku penipuan/*fraud*. Kesimpulan ini didukung oleh temuan uji hipotesis yang menunjukkan jika audit internal memiliki pengaruh terkait pencegahan penipuan/*fraud*. Kualitas audit internal akan meningkat untuk mencegah penipuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep Standar Profesi Audit Internal yang menghasilkan jika audit internal melakukan tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga membantu meningkatkan kinerja organisasi. Dengan berlandaskan pada prinsip *profesionalisme*, integritas, dan pendekatan berbasis risiko, audit internal menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan secara berkelanjutan.

Standar profesional audit internal menurut Tugiman (2019:16), menekankan pentingnya beberapa indikator seperti independensi, keahlian profesional, jangkauan tugas audit internal, pelaksanaan prosedur pemeriksaan, dan pengelolaan divisi audit internal. Agar audit dapat dilakukan secara objektif, independensi auditor internal sangat diperlukan, sedangkan kemampuan profesional mengatur bagaimana auditor harus bersikap saat menjalankan tugasnya.

Penelitian sebelumnya oleh Yuliana Astuti (2019), Muhammad Taufik Hidayat S (2021), Oshi Adliana, Anggit Adhiya Hendratmoko, Achmad Fadjar (2021) menyatakan, pencegahan penipuan/*fraud* dipengaruhi audit internal; audit internal yang baik memiliki pengaruh yang besar juga terhadap pencegahan penipuan/*fraud*.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden auditor internal bahwa rencana audit tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko yang idealnya disusun berdasarkan Risiko Utama

pada Risk Register yang telah disusun oleh seluruh pemilik risiko. Namun selama ini risiko utama masih belum mencerminkan risiko yang sering terjadi pada proses operasional perusahaan, sehingga rencana audit tahunan yang disusun masih berdasarkan faktor risiko dan pertimbangan internal audit (data historis hasil audit, kelas kantor, sumber daya yang dikelola, jarak dari regional, dan data historis kejadian *fraud*).

Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*

Temuan uji menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* sangat dipengaruhi oleh mekanisme *whistleblowing*. Temuan uji hipotesis juga mendukung gagasan bahwa upaya pencegahan penipuan dipengaruhi oleh sistem *whistleblowing*. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan kualitas sistem whistleblower, upaya pencegahan penipuan pun akan meningkat. Hasil ini sejalan dengan teori Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (*National Committee on Governance Policy*) bahwa ketika sistem *whistleblowing* yang efisien diterapkan, orang-orang enggan melakukan pelanggaran karena takut dilaporkan. Dengan meningkatnya keinginan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, mencerminkan bahwa sistem pelaporan berjalan secara efektif.

Sistem *whistleblowing* menjadi bagian integral dari mekanisme pengendalian internal yang dapat mencegah terjadinya kondisi di lembaga pemerintah, menurut Semendawai (2011). Dengan adanya sistem ini, karyawan atau individu yang mungkin berniat melakukan kecurangan akan merasa enggan karena keberadaan sistem pelaporan yang efektif dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan. *Whistleblowing system* memungkinkan individu untuk melaporkan kecurangan dengan identitas yang dirahasiakan.

Salah satu keuntungan dari *sistem whistleblowing*, menurut Tuanakotta (2019), adalah adanya mekanisme untuk mendeteksi masalah pelanggaran secara dini. Miceli et al. (2008) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pemberitahuan atau penyampaian informasi dari anggota organisasi, perusahaan, atau pihak lain dari organisasi. Perilaku menyimpang atau di luar aturan yang berlaku oleh seseorang yang melakukannya di dalam perusahaan dianggap sebagai *whistleblowing*. *Whistleblower* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menyampaikan ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Taufik Hidayat S (2021), Windy Yulian Maulida, Bunga Indah Bayunitri (2021), Naufal Asyraf Faris (2022), Sylmi Syifa Syafitri, dan Syafdinal (2023), yang semuanya menunjukkan efektivitas *sistem whistleblowing* dalam menghentikan aktivitas penipuan. Jumlah *whistleblower* yang lebih tinggi berkorelasi dengan dampak yang lebih signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No 073/DEKOM/0322 dan No KD.026/DIRUT/0322 yang mengatur sistem pelaporan pelanggaran di PT Pos Indonesia (Persero) diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022. Sistem pelaporan pelanggaran diatur dalam Surat Keputusan Direksi yang mencakup hal-hal struktural, operasional, dan pemeliharaan serta Pernyataan Komitmen yang terdapat pada Bab VI Surat Keputusan tersebut. Dalam Keputusan Direksi disebutkan bahwa Pernyataan komitmen sangat diperlukan agar Keputusan Bersama ini dapat dipatuhi oleh seluruh insan Pos. Seluruh karyawan sudah menandatangani Surat Pernyataan Komitmen menunjukkan kesediaan mereka untuk melaksanakan WBS dan akan berpartisipasi aktif dalam melaporkan jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi, *malware*, atau pelanggaran..

Menurut Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, perusahaan akan memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaporkan dan terbukti dapat mencegah dan/atau mengurangi kejahatan yang merugikan perusahaan. Kriteria dan besarnya yang diberikan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi yang terpisah. Sampai dengan saat ini Keputusan Direksi tentang penghargaan tersebut belum diatur.

KESIMPULAN

Hasil dari rumusan masalah dalam penilaian dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi audit internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang diterapkan di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung dinilai berada pada rentang cukup positif. Mereka secara parsial berdampak pada pencegahan penipuan. Oleh karena itu, semakin efektif audit internal dan sistem *whistleblowing*, semakin efektif pencegahan penipuan/*fraud*.

Keterbatasan Penelitian

Sampel penelitian yang masih kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah responden yang masih terbatas. Sehingga sulit dalam proses pengambilan sampel. Untuk penelitian selanjutnya bisa mengambil sampel yang lebih besar.

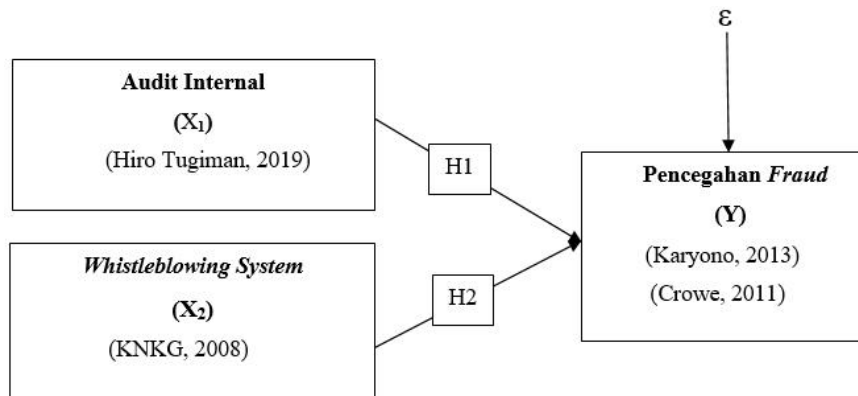
DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–106.
- Aditya, F., & Nurbaiti, Annisa S.E., M. s. (2020). *Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (studi kasus pada PT. PLN 9persero) bagian wilayah sumatera Barat*. 7(2), 2710–2722.
- Adliana, O., Adhiya, A., & Fadjat, H. A. (2022). The Role of Internal Audit and the Implementation of Good Corporate Governance in Fraud Prevention. *ASIA AND THE CAUCASUS English Edition*, 23, 2022.
- Agoes, S. (2022). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik Buku 2* (5th ed.). Salemba Empat.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, Conan C. zimbelman, M. F. (2019). Fraud Examination. In *Cengage Learning Asia* (6th ed.). Cengage Learning.
- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). *Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan*

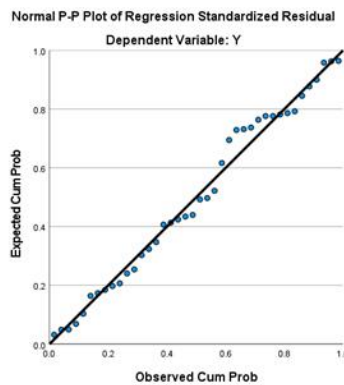
- Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25933>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2019). *Auditing and Assurance Services Global Edition* (17th ed.). Pearson.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76.
- Astuti, Y. (2019). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Survei pada Bank BUMN P, Q, R, S, T di Bandung)*. Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama.
- Bucheru, M., Avram, L., & Beleuța, V. (2025). *Fraud methods are evolving. What should organizations do in 2025 to stay one step ahead of fraudsters?*
- Christine, D., & Apriwandi, A. (2022). Audit Internal dan Pencegahan Kecurangan- Bukti Empiris Pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG). *Owner*, 6(3), 3270–3280. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1046>
- Effendi, M. A. (2010). *Risk Based Internal Auditing*.
- Faris, N. A. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Karyawan, Whistle Blowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Pada PT BPR Cianjur Jabar)*. Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama.
- Gramling, A. A., Rittenberg, L. E., & Johnston-Zehms, K. M. (2023). *Auditing: A Risk-Based Approach*. Cengage Learning.
- Hery, S. M. C. R. C., & Hery, S. E. M. S. C. R. P. R. S. A. C. (2017). *Auditing Dan Asurans: Integrated And Comprehensive Edition (Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional)*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2023). What Drives Experiential Loyalty Towards The Islamic Banks ? Evidence From Indonesia. *Advanced International Journal Of Business, Entrepreneurship And Smes (AIJBES)*, 4((32)), 12–19. <https://doi.org/10.35631/IJEP.432002>.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud* (1st ed.). CV Andi Offset.
- Maulana, M. A., Rivanda, A. K., Abirukmana, R. P., & Dwiastuti, S. S. (2025). Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan pada Perum Bulog Kota Bandung. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(8), 1173–1190. <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i8.395>
- Maulana, M. A., Rivanda, A. K., & Siswanto, N. R. (2024). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Karyawan PT. FVS Arthadarma Indonesia. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*, 7(5), 1387–1399.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in organizations*. Psychology Press.
- Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2018). Internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims. *Journal of Financial Crime*, 25(3), 891–906. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2017-0067>
- Nurjanah, I. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 517–528. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.396>
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia*. In *OECD Publishing* (Issue 28).
- Patty, R. R. (2024). *Diduga Gelapkan Dana Perusahaan Rp 398 juta, Kepala Pos di Maluku ditahan*. Regional.Kompas.Com.
- Purbayati, R., Rivanda, A. K., Afgani, K. F., & Pakpahan, R. (2022). Are Banking Industry More Resilient Against the Covid-19 Pandemic in Indonesia? *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 4(11), 23–41. <https://doi.org/10.35631/aijbes.411003>
- Rahmat, F. N., Rivanda, A. K., & Latifani, S. (2024). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *BUANA*

- ILMU, 8(2), 66-80.
- Rahmawati, O., Meini, Z., & Digdowiseiso, K. (2023). The Effect of Good Corporate Governance, Internal Audit, And Whistleblowing System on Fraud (Empirical Study on State-Owned Enterprise Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 Period). In *Business and Social Science (IJEMBS) Peer-Reviewed-International Journal* (Vol. 3, Issue 2).
- Riduan, A. (2022). *Kabar Terbaru! Kasus Hilangnya Materai PT. POS Indonesia KCU Bandar Lampung, 1 Pelaku Berhasil Diamankan*. Saibumi.Com.
- Rivanda, A. K., & Dwiastuti, S. S. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas). *Buana Ilmu*, 8(2), 97–109.
- Rivanda, A. K. ., & Kartadjumena, E. . (2025). Faktor Determinan Financial Distress. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 345–365. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i2.545>
- Roemkenya Madolidi Handoyo, B., & Indah Bayunitri, B. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i1.181>
- Sawyer, L. B., & Sawyer, L. B. (2019). *Sawyer's Internal Auditing: Enhancing and Protecting Organizational Value* (7th ed.). Institute of Internal Auditors.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting, 4th Edition* (4th ed.). John Wiley and Sons Ltd.
- Sutadisastra, R. (2021). *PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP KECURANGAN (Studi Kasus Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)*. Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama.
- Syafitri, S. S., & Syafdinal, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner*, 7(1), 866–878. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1466>
- Tanjung, W. J. (2024). *Tabungan Hilang, Puluhan Warga Oki Geruduk Kantor Pos Palembang*. Detik.Com.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Akuntansi forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2022). *Audit Internal Berbasis Risiko*.
- Tugiman, H. (2019). *Standar Profesional Audit Internal*. PT Kanisius.
- Utami, L. (2018). PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS KECURANGAN PERUSAHAAN SEKTOR JASA DI BURSA EFEK INDONESIA. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 2).
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yulian Maulida, W., & Indah Bayunitri, B. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

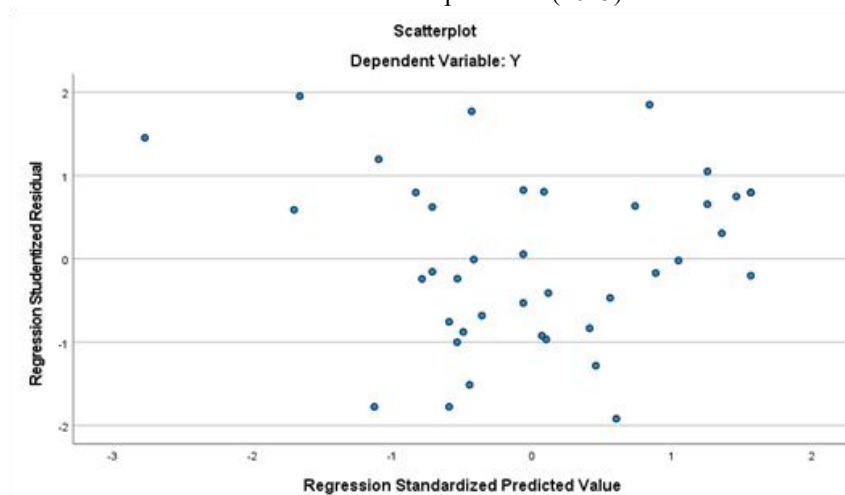
GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti (2025)



Gambar 2. Kurva Normal Probability Plot (P-Plot)
Sumber: Hasil Output SPSS (2025)



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Output SPSS (2025)

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Ukuran
Kecurangan	<i>Risk Factor Fraud Pentagon Theory:</i>	Hindari tekanan eksternal yang akan membuat pegawai akunting untuk menyusun laporan keuangan	Ordinal

(fraud) (Y) (1-3 Karyono 2013, 4-5 Crowe 2011)	1. Tekanan	yang tidak akuntabel. Tetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam. Ciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai prestasi kerja.	
	2. Peluang	Peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya. Ciptakan catatan akuntansi yang akurat dan jelas serta berfungsi sebagai sarana kendali. Tetapkan pengamanan fisik terhadap aset dengan inventarisasi fisik secara berkala dan pengamanan lokasi/ tempat penyimpanan. Lakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan. Penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku <i>fraud</i> . Tetapkan sistem penilaian prestasi kerja yang adil.	Ordinal
	3. Rasionalisasi	Ada aturan perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam kebijakan organisasi. Ada aturan sanksi tegas dan jelas bila ada penyimpangan aturan bagi pelakunya.	Ordinal
	4. Kompetensi	Otoritas fungsional dalam organisasi (<i>position/function</i>). Ego yang kuat dan kepercayaan diri (<i>confidence/ego</i>). Toleransi tinggi untuk stress (<i>imunity to stress</i>).	Ordinal
	5. Arogansi	Menghindari kontrol internal dan tidak tertangkap. Memiliki sikap intimidasi. Menerapkan gaya manajemen otokratis. Takut akan kehilangan posisi atau status mereka.	Ordinal
Audit Internal (X ₁) (Hiro Tugiman, 2019)	Standar Profesional Audit Internal: 1. Independensi	Independensi Organisasi. Objektivitas Individual. Kendala terhadap independensi dan objektivitas.	Ordinal
	2. Kemampuan Profesional	Menerapkan kemampuan profesional. Mempertimbangkan penggunaan sarana audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya. Waspada terhadap risiko signifikan. Cermat dalam melaksanakan penugasan konsultasi.	Ordinal
	3. Lingkup Pekerjaan	Keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Perlindungan terhadap harta. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Pencapaian tujuan.	Ordinal
	4. Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan pemeriksaan. Pengujian dan pengevaluasian informasi. Pencapaian hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil audit.	Ordinal
	5. Manajemen Bagian Audit Internal	Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Perencanaan. Kebijakan dan prosedur. Pengendalian mutu.	Ordinal
Whistleblowing System (X ₂)	Indikator Whistleblowing	Berkomitmen untuk melaporkan setiap menemukan atau melihat adanya pelanggaran.	Ordinal

(KNKG, 2008)	System: Aspek Struktural	Memiliki kebijakan terhadap perlindungan pelapor pelanggaran. Memiliki unit independen yang mengelola <i>whistleblowing system</i> . Memiliki sumber daya yang berkualitas dan jumlah personil sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran.	
	Aspek Operasional	Memiliki media khusus untuk penyampaian laporan pelanggaran. Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan maupun pihak lain yang melihat tindakan kecurangan agar segera melaporkannya. Menjamin kerahasiaan pelapor pelanggaran.	Ordinal
	Aspek Perawatan	Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan <i>whistleblowing system</i> . Adanya komunikasi antara perusahaan dengan karyawan mengenai hasil penerapan <i>whistleblowing system</i> . Memberikan insentif atau penghargaan <i>whistleblowing system</i> .	Ordinal

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 2. Uji Validitas
Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1 (Y)	0,584	0,312	VALID
P2 (Y)	0,542	0,312	VALID
P3 (Y)	0,551	0,312	VALID
P4 (Y)	0,722	0,312	VALID
P5 (Y)	0,727	0,312	VALID
P6 (Y)	0,542	0,312	VALID
P7 (Y)	0,570	0,312	VALID
P8 (Y)	0,557	0,312	VALID
P9 (Y)	0,564	0,312	VALID
P10 (Y)	0,605	0,312	VALID
P11 (Y)	0,628	0,312	VALID
P12 (Y)	0,697	0,312	VALID
P13 (Y)	0,725	0,312	VALID
P14 (Y)	0,701	0,312	VALID
P15 (Y)	0,651	0,312	VALID
P16 (Y)	0,786	0,312	VALID
P17 (Y)	0,654	0,312	VALID
P18 (Y)	0,752	0,312	VALID

Validitas Variabel Audit Internal

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P19 (X1)	0,703	0,312	VALID
P20 (X1)	0,785	0,312	VALID
P21 (X1)	0,748	0,312	VALID
P22 (X1)	0,711	0,312	VALID
P23 (X1)	0,784	0,312	VALID
P24 (X1)	0,762	0,312	VALID
P25 (X1)	0,738	0,312	VALID
P26 (X1)	0,784	0,312	VALID
P27 (X1)	0,821	0,312	VALID
P28 (X1)	0,735	0,312	VALID
P29 (X1)	0,778	0,312	VALID
P30 (X1)	0,772	0,312	VALID

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P31 (X1)	0,793	0,312	VALID
P32 (X1)	0,783	0,312	VALID
P33 (X1)	0,833	0,312	VALID
P34 (X1)	0,784	0,312	VALID
P35 (X1)	0,788	0,312	VALID
P36 (X1)	0,743	0,312	VALID
P37 (X1)	0,751	0,312	VALID
P38 (X1)	0,730	0,312	VALID

Validitas Variabel *Whistleblowing System*

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
P39 (X2)	0,672	0,312	VALID
P40 (X2)	0,761	0,312	VALID
P41 (X2)	0,780	0,312	VALID
P42 (X2)	0,809	0,312	VALID
P43 (X2)	0,640	0,312	VALID
P44 (X2)	0,739	0,312	VALID
P45 (X2)	0,659	0,312	VALID
P46 (X2)	0,654	0,312	VALID
P47 (X2)	0,712	0,312	VALID
P48 (X2)	0,760	0,312	VALID

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Keterangan	Cronbach's Alpha
X1	Audit Internal	0,985
X2	<i>Whistleblowing System</i>	0,953
Y	Pencegahan Kecurangan	0,939

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 4. Uji Multikoleniaritas Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.691	1.448
X2	.691	1.448

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pencegahan *Fraud*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor	Kategori
1	Tekanan	523	600	87,2	4,35	Sangat Baik
2	Peluang	991	1200	82,6	4,13	Baik
3	Rasionalisasi	336	400	84	4,20	Baik
4	Kompetensi	467	600	77,8	3,89	Baik
5	Arogansi	650	800	81,2	4,06	Baik
Total		2.967	3.600	82,42	4,13	Baik

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 6. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Audit Internal

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor	Kategori
1	Independensi	534	600	89	4,45	Sangat Baik
2	Kemampuan Profesional	705	800	88,1	4,41	Sangat Baik
3	Lingkup Pekerjaan	869	1000	86,9	4,34	Sangat Baik
4	Pelaksanaan Kegiatan	701	800	87,6	4,38	Sangat Baik

5	Manajemen Bagian Audit Internal	711	800	88,9	4,44	Sangat Baik
Total		3.520	4.000	88,1	4,40	Sangat Baik

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 7. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Whistleblowing System

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor	Kategori
1	Aspek Struktural	622	800	77,7	3,89	Baik
2	Aspek Operasional	477	600	79,5	3,97	Baik
3	Aspek Perawatan	433	600	72,2	3,60	Baik
Total		1.532	2.000	76,6	3,83	Baik

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 8. Regresi Linier Berganda Coefficients

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1 (Constant)	24.525	6.579	
X1	.224	.088	.281
X2	.782	.136	.638

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.686	.669	5.25455

a. Predictors: (Constant, X2,X1)

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 10. Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	24.525	6.579	3.728	<,001
X1	.224	.088	2.533	.016
X2	.782	.136	5.753	<,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 11. Pengujian Hipotesis Secara Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2228.195	2	1114.097	40.351	<,001 ^b
Residual	1021.580	37	27.610		
Total	3249.775	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah peneliti (2025)